



COREinsight

MEREDAM GUNCANGAN EKONOMI DARI GEJOLAK TIMUR TENGAH

Kutipan

Semua konten dalam publikasi yang dikeluarkan oleh CORE Indonesia dapat dikutip secara bebas selama mencantumkan sumber

Rangkuman Utama:

- Ancaman penutupan Selat Hormuz, yang merupakan jalur utama bagi 25 persen perdagangan minyak mentah dunia dan 20 persen gas alam global, berpotensi mengerek harga minyak dunia. Harga minyak Brent diprediksi naik ke kisaran USD 100–150 per barel. Jika hal ini terjadi, pasar energi global akan mengalami guncangan pasokan (*supply shock*).
- Sebagai negara net importir minyak, pemerintah Indonesia harus bersiap dengan potensi melebarnya defisit fiskal. Berdasarkan sensitivitas APBN 2025, setiap kenaikan US\$1 per barel harga minyak ICP, pemerintah harus menambah belanja Rp 10,1 triliun, sementara penerimaan hanya naik Rp 3,2 triliun, sehingga secara bersih mengalami defisit Rp 6,9 triliun.
- Tekanan inflasi diperkirakan akan berdampak langsung pada konsumsi rumah tangga. Berdasarkan data historis 2014–2023, lonjakan inflasi cenderung menyebabkan penurunan tajam konsumsi rumah tangga dalam tiga bulan pertama, dan baru kembali ke level normal setelah sekitar 20 bulan.
- Volatilitas pasar keuangan global meningkat tajam. Pada hari pertama serangan (13 Juni), harga emas naik 1,38%, sementara indeks Dow Jones dan S&P 500 masing-masing turun 1,79% dan 1,13%. Pasca gencatan senjata (24 Juni), pasar sempat pulih: Dow Jones naik 2,1% dan S&P 500 terkerek 1,9%. Namun, volatilitas tetap tinggi akibat ketidakpastian lanjutan dari konflik.
- Gencatan senjata pada 24 Juni tampak sebagai pernyataan politik sepihak tanpa dukungan proses diplomatik formal. Kondisi ini menciptakan risiko tinggi terjadinya eskalasi ulang, tetap tingginya potensi volatilitas harga energi global, dan naiknya risiko beban fiskal Indonesia.



Perjalanan Konflik: Dari Eskalasi ke Gencatan Senjata

Konflik Israel-Iran memuncak pada Juni 2025 ketika Israel melancarkan serangan langsung terhadap fasilitas nuklir Iran pada 13 Juni. Serangan ini menyasar ilmuwan nuklir dan pejabat militer senior Iran sebagai langkah pencegahan terhadap potensi pengembangan senjata nuklir. Namun di sinilah ironinya dimulai. *International Atomic Energy Agency* (IAEA) belum menemukan bukti konkret bahwa Iran membangun senjata nuklir. Meski Iran memperkaya uranium hingga 60 persen, IAEA belum menyatakan Iran melanggar batas pengembangan senjata nuklir. Alih-alih menghentikan ambisi nuklir Iran, serangan Israel justru berisiko mempercepatnya.

Situasi semakin rumit ketika AS ikut campur dengan meluncurkan serangan udara ke tiga fasilitas nuklir Iran di Fordo, Natanz, dan Isfahan pada 22 Juni 2025. Yang mencengangkan, tiga bulan sebelumnya Direktorat Intelijen Nasional AS justru menyatakan Iran belum menunjukkan niat mengaktifkan kembali program senjata nuklir sejak 2003. Keterlibatan AS memperluas konflik dan menciptakan ketegangan baru di kawasan.

Iran tidak tinggal diam. Mereka membalas dengan menyerang basis militer AS di Qatar. Konflik yang semula terbatas kini meluas ke kawasan sipil dan menimbulkan korban jiwa. Elite politik Israel dan AS bahkan mulai menyinggung kemungkinan perubahan rezim Iran, menambah dimensi ideologis yang memperkeruh situasi.

Setelah hampir dua pekan saling serang, Trump mengumumkan gencatan senjata sementara antara Israel dan Iran pada 24 Juni 2025. Namun kesepakatan ini tampak lebih seperti pernyataan politik sepihak tanpa proses diplomatik formal atau pengawasan internasional yang jelas.



Perdagangan Energi Global melalui Selat Hormuz (2020 – Q1 2025)

Total Aliran Minyak (juta barel per hari)

- 2023: 21.4
- 2024: 20.3
- Q1 2025: 20.1

Perdagangan Minyak Maritim Dunia

- 2023: 76.0
- 2024: 75.5
- Q1 2025: 75.7

Konsumsi Minyak Dunia (juta barel per hari)

- 2023: 101.8
- 2024: 102.5
- Q1 2025: 102.1

Badai Tekanan dari Selat Hormuz

Sebagai jalur vital yang menyalurkan seperempat perdagangan minyak dunia dan seperlima pasokan gas alam cair (LPG) global, ancaman terhadap Selat Hormuz bukan sekadar isu regional melainkan potensi krisis ekonomi dunia. Konflik ini merambat ke ekonomi global melalui tiga jalur utama: lonjakan harga energi yang memicu inflasi, kenaikan harga pangan dalam negeri, serta kepanikan pasar yang mengguncang sektor keuangan. Meski secara geografis jauh dari pusaran konflik, Indonesia tidak luput dari dampak eskalasi ini karena ketergantungan pada perdagangan global dan sensitivitas terhadap guncangan eksternal.

A. Dampak terhadap Harga Energi

Eskalasi konflik Israel-Iran yang memuncak pada pertengahan Juni 2025 tak hanya menggetarkan Timur Tengah, tetapi juga mengguncang ekonomi global. Ancaman penutupan Selat Hormuz, yang mencapai titik krusial pada 23 Juni sebelum gencatan senjata diumumkan keesokan harinya, menjadi sumber kekhawatiran utama. Iran mengancam akan menutup Selat Hormuz sebagai bentuk balasan jika AS ikut campur langsung (menyerang Iran) dalam konflik Israel-Iran, alih-alih menekan Israel untuk berhenti menyerang Iran. Selat Hormuz merupakan jalur vital bagi **25 persen perdagangan minyak dunia** atau sekitar **20 juta barel per hari**, termasuk suplai LNG dari Qatar yang menyumbang **20 persen pasokan LNG global**.

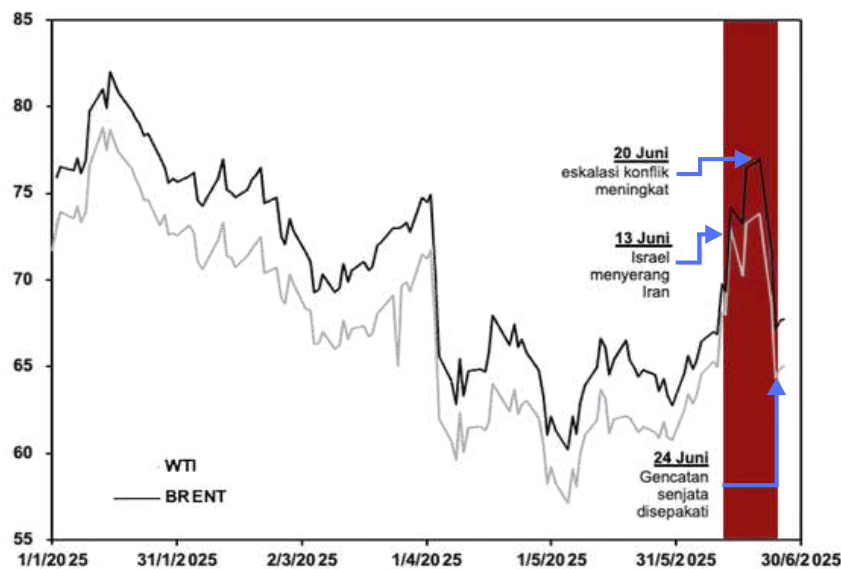
Data *Energy Information Administration* (EIA) 2025 menunjukkan, volume perdagangan energi melalui Selat Hormuz konsisten di kisaran 20-21 juta barel per hari, atau 26-28 persen dari total perdagangan minyak maritim dunia. Di tengah konsumsi petroleum global yang tumbuh dari 91 juta barel (2020) menjadi 102,1 juta barel per hari (Q1 2025), lokasi strategis Selat Hormuz tidak tergantikan. Ketiadaan alternatif memadai membuat selat ini menjadi titik sumbatan ekonomi global yang sangat rentan. Perdagangan LNG melalui jalur ini juga terus meningkat dari 10,7 miliar kaki kubik per hari menjadi 11,5 miliar kaki kubik per hari pada Q1 2025, memperkuat posisinya di tengah transisi energi global.

Penutupan Selat Hormuz bukan sekadar persoalan logistik regional, ini adalah **urat nadi energi dunia**. Jalur ini digunakan produsen utama seperti Arab Saudi, UEA, Kuwait, Qatar, dan Irak. Meski Arab Saudi dan UEA memiliki jalur alternatif berupa pipa darat, negara seperti Kuwait, Qatar, dan Bahrain **tidak punya opsi lain**. Bahkan Iran sendiri, yang secara geopolitik berkepentingan dengan blokade, juga mengeksport mayoritas minyaknya melalui jalur ini ke pasar Tiongkok.

“

Selat Hormuz adalah jalur vital energi dunia, menyalurkan 25% minyak global dan 20% pasokan LNG. Ketergantungan tinggi membuat blokade selat ini, seperti yang terancam dalam konflik Israel-Iran, menjadi risiko besar bagi stabilitas energi dan ekonomi global. Tak ada jalur alternatif yang sebanding. Negara seperti Kuwait, Qatar, dan Bahrain sepenuhnya bergantung pada selat ini. Bahkan Iran, yang mengancam akan memblokir, tetap menggunakan jalur ini untuk ekspor.

”



Grafik 1. Tren Pergerakan Harga Minyak Mentah, Januari – Juni 2025 (USD/barel)
Sumber: Laman *Trading Economics*

Jika penutupan selat benar-benar terjadi, pasar energi global akan mengalami *supply shock* yang tak dapat dikompensasi penuh oleh cadangan strategis IEA sebesar 1,2 miliar barel maupun pipa Saudi East-West yang hanya mampu menyalurkan 5 juta barel per hari. Proyeksi harga minyak Brent dalam skenario tersebut melonjak ke kisaran USD 100-150 per barel, menciptakan tekanan inflasi global yang menyebar melalui rantai pasok. Grafik 1 menunjukkan harga minyak bergejolak ketika eskalasi perang meningkat sepanjang 13-24 Juni.

Kenaikan harga energi ini memperkuat tekanan *cost-push inflation* di negara-negara importir energi. Di AS, harga bensin diperkirakan melonjak ke level USD 5-7 per galon, memangkas konsumsi rumah tangga dan memukul sektor ritel.

Negara	Nilai Ekspor Minyak Mentah Thn 2024 (Miliar USD)	Proporsi terhadap Total Ekspor	Pasar Utama	Jalur Distribusi
Bahrain	4,72	38%	Saudi Arabia, UAE, USA, Belanda	Selat Hormuz
Kuwait	55,07	92%	UAE, India, Jordan	Selat Hormuz
Qatar	77,55	88%	China, Korea Selatan, India, Jepang	Selat Hormuz
UAE	172,27	58%	Irak, Pakistan, Kenya Selat Hormuz, Pipa darat	Selat Hormuz, Pipa darat
Iran*	1,23	10%	Asia, China, Area Nes, Irak	Selat Hormuz
Arab Saudi	223,40	73%	China, Jepang, Korea Selatan, India	Selat Hormuz, Pipa darat

Tabel 1. Perbandingan Nilai Ekspor Komoditas Minyak Bumi (HS 27)

*) Tahun 2024, Iran terkena sanksi larangan ekspor minyak. Pada 2023, proporsi ekspor minyak Iran mencapai 68%.

Sumber: ITC trademap

Tabel 1 menunjukkan beberapa negara berpotensi menghadapi tekanan perdagangan jika Selat Hormuz diblokade. Bahrain dengan nilai ekspor minyak US\$ 4,72 miliar (38% dari total ekspor) cukup bergantung pada stabilitas perdagangan di selat ini. Kuwait menghadapi kerentanan ekstrem dengan ekspor minyak mencapai 92% (US\$ 55,07 miliar) dari total ekspor dan sepenuhnya bergantung pada Selat Hormuz. Lokasi geografis Kuwait yang terkurung di Teluk Persia menyulitkan pembangunan rute alternatif yang *feasible*, menempatkannya sebagai negara dengan risiko sistemik tertinggi. Qatar juga sangat bergantung dengan proporsi ekspor minyak mencapai 88% dari total ekspor. Tanpa jalur alternatif, Selat Hormuz adalah satu-satunya jalan bagi Qatar. Lokasi geografis di semenanjung Arab yang menjorok ke Teluk Persia membatasi opsi logistik alternatif, menciptakan kelemahan rantai pasok. Sementara UEA dengan proporsi ekspor minyak 58% dari total ekspor juga berpotensi mengalami gangguan stabilitas ekonomi domestik. Meski UEA memiliki pipa alternatif, kapasitasnya tidak sebanding dengan pengiriman melalui Selat Hormuz.

Iran memiliki proporsi ekspor minyak hanya 10% pada 2024 akibat embargo, namun sebelum embargo (2023) mencapai 68% atau US\$ 77,09 miliar, menunjukkan Iran juga bergantung pada Selat Hormuz. Arab Saudi, meski memiliki alternatif pipa darat dan Laut Merah, kapasitasnya tidak memadai dibanding fasilitas di Selat Hormuz. Disrupsi ini berbahaya mengingat Arab Saudi adalah eksportir minyak terbesar dengan valuasi US\$ 223,40 miliar (73% dari total ekspor) pada 2024.

Meski secara geografis jauh dari pusat konflik, Indonesia tidak kebal dari dampak ekonominya. Ketergantungan pada perdagangan global, impor energi, dan sensitivitas tinggi terhadap ketidakpastian geopolitik membuat perekonomian nasional tetap rentan terhadap guncangan eksternal.



Blokade Selat Hormuz dapat memicu guncangan perdagangan bagi negara-negara Teluk yang sangat bergantung pada jalur ini. Kuwait menjadi paling rentan dengan 92% ekspor (US\$ 55,07 miliar) bergantung sepenuhnya pada selat tanpa alternatif. Qatar (88%) dan Bahrain (38%) juga menghadapi risiko tinggi karena keterbatasan jalur logistik.

Kenaikan harga minyak global menjadi saluran transmisi utama. Sebagai net importir minyak mentah yang nilai defisitnya mencapai US\$ 8,12 miliar pada 2024 dan 21 persen impornya dipasok dari Timur Tengah, Indonesia akan menghadapi lonjakan biaya impor yang memperlebar defisit neraca perdagangan dan menambah beban APBN. Situasi diperparah jika disertai pelemahan rupiah yang membuat impor energi semakin mahal.

Dampak terhadap APBN sangat ditentukan asumsi dasar APBN 2025: harga minyak (ICP) USD 82 per barel dan nilai tukar Rp16.000 per USD. Selama harga minyak tidak melebihi angka ini, tekanan fiskal relatif terkendali. Namun bila eskalasi mendorong harga naik di atas batas tersebut, tekanan anggaran akan meningkat signifikan.

Yang paling mengkhawatirkan adalah pembengkakan belanja subsidi energi, terutama jika harga minyak global melonjak ke USD 100-130 per barel. Pemerintah harus menanggung biaya tambahan untuk menjaga harga BBM domestik tetap stabil. Berdasarkan sensitivitas APBN 2025, **setiap kenaikan US\$1 per barel harga minyak ICP, pemerintah harus menambah belanja Rp 10,1 triliun**, sementara penerimaan hanya naik Rp 3,2 triliun, sehingga secara bersih mengalami defisit Rp 6,9 triliun. Ini menunjukkan Indonesia sangat rentan terhadap volatilitas harga minyak dunia, di mana kenaikan harga justru memperburuk posisi fiskal karena beban subsidi energi yang besar dalam struktur APBN.



Lonjakan harga minyak global berpotensi memperberat beban fiskal Indonesia, terutama akibat pembengkakan subsidi energi. Jika harga minyak dunia melonjak ke US\$100–130 per barel, pemerintah harus menanggung biaya besar untuk menjaga harga BBM tetap stabil. Berdasarkan sensitivitas APBN 2025, setiap kenaikan US\$1 per barel ICP menambah belanja negara Rp 10,1 triliun.

B. Dampak terhadap Harga Pangan

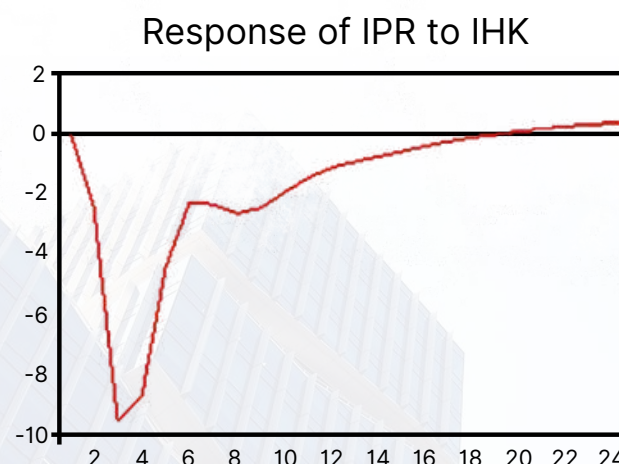
Negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia, berpotensi menghadapi lonjakan biaya impor pangan dan energi akibat disrupsi logistik global. Komoditas strategis seperti gandum (100% impor), kedelai (70%), dan gula (30–40%) berpotensi mengalami tekanan harga karena kenaikan biaya pengiriman dari negara eksportir utama serta pelemahan nilai tukar.

Meskipun konflik ini memberikan dampak yang lebih kecil dibandingkan konflik Rusia dan Ukraina terhadap rantai pasok pangan, sebagai negara net importir minyak, Indonesia tetap harus menghadapi risiko. Lonjakan harga minyak turut mendorong kenaikan biaya logistik, memperberat distribusi domestik yang sangat bergantung pada transportasi darat dan laut berbasis BBM. Biaya logistik yang tinggi menciptakan efek ganda terhadap inflasi pangan, baik dari sisi impor maupun distribusi dalam negeri.

Dampak kenaikan harga BBM terjadi dalam dua tahap. Tahap pertama ditandai oleh lonjakan langsung biaya transportasi dan distribusi, yang menekan sektor logistik, pertanian, dan perikanan. Tahap kedua muncul ketika seluruh pelaku rantai pasok menaikkan harga sebagai respons, yang pada akhirnya melemahkan daya beli masyarakat dan mendorong pergeseran pola konsumsi ke produk yang lebih murah dan kurang bergizi. Daerah terpencil seperti Papua dan Indonesia Timur berpotensi terdampak paling parah karena tingginya ketergantungan pada energi fosil dan mahalannya biaya logistik. Ketahanan pangan nasional pun berpotensi tertekan seiring meningkatnya beban pengadaan, penyimpanan, dan distribusi di sisi pemerintah.

Kenaikan harga energi juga memicu inflasi domestik, terutama dari biaya produksi dan distribusi. Kondisi ini mengingatkan pada 2022 saat konflik Rusia-Ukraina memicu lonjakan komoditas global dan kenaikan BBM domestik, mendorong inflasi Indonesia mencapai 5% secara tahunan. CORE Indonesia mencatat lonjakan inflasi historis seperti itu langsung memukul konsumsi rumah tangga.

Berdasarkan estimasi data Indeks Penjualan Riil (IPR) dan Indeks Harga Konsumen (IHK) periode 2014-2023, lonjakan inflasi menyebabkan penurunan konsumsi rumah tangga secara tajam dalam tiga bulan pertama, baru pulih bertahap dan normal kembali pada bulan ke-20. Dengan asumsi harga minyak naik pada kuartal III-IV, tekanan terhadap daya beli masyarakat diperkirakan berlangsung sepanjang periode tersebut (Grafik 2).



Grafik 2. Dampak Inflasi Terhadap Penurunan Konsumsi, CORE Indonesia (diolah)

C. Dampak terhadap Sektor Keuangan

Dampak guncangan di sektor riil sebagaimana di atas, diperkirakan akan merambat ke sektor keuangan. Ancaman penutupan Selat Hormuz mendorong investor global bergegas mengamankan aset ke investasi yang lebih aman (*safe-haven*). Hal ini terlihat dari harga emas yang melonjak 1,38% pada hari pertama serangan Israel ke Iran, 13 Juni. Bersamaan itu, *yield* obligasi AS melemah dan indeks dolar menguat ke 98,32. Pasar saham global terkoreksi: Dow Jones turun 1,79%, S&P 500 melemah 1,13%, dan Nikkei 225 terkoreksi 0,89% pada hari yang sama.

Ketika eskalasi memuncak pada 22 Juni, Dow Jones, S&P 500, dan Nikkei 225 masih belum pulih. Namun saat gencatan senjata disepakati Israel-Iran pada 24 Juni, situasi berbalik dramatis: Dow Jones naik 2,1%, S&P 500 terkerek 1,9%, dan Nikkei 225 melompat 2,5% dibanding periode 13 Juni. Meski begitu, prospek positif ini berpotensi terhambat mengingat situasi yang masih sulit diprediksi.

Jika ketegangan berlanjut, ini dapat mendorong pergerakan modal ke negara dengan basis ekonomi kuat seperti AS, situasi yang membahayakan sektor keuangan negara berkembang termasuk Indonesia. Konflik Israel-Iran berpotensi menekan nilai tukar rupiah karena kecenderungan investor kabur membawa dana ke tempat yang lebih menguntungkan (*capital flight*) saat terjadi gejolak. Tekanan terhadap rupiah terbaca dari melemahnya nilai rupiah terhadap dolar sepanjang 13-23 Juni sebesar 1,52%.

Potensi pelemahan nilai tukar berkorelasi langsung dengan dinamika Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBN). Dalam nota Keuangan RAPBN 2025 disebutkan setiap pelemahan Rp 100/USD meningkatkan penerimaan Rp 4,7 triliun melalui PNPB terkait ekspor komoditas dan pajak ekspor. Namun dari sisi belanja, pelemahan sebesar Rp 100/USD dapat meningkatkan beban belanja pemerintah pusat hingga Rp 8 triliun. Dengan selisih pendapatan dan belanja mencapai Rp 3,4 triliun, ini mengonfirmasi bahwa melemahnya rupiah berdampak sistemik terhadap pelebaran defisit fiskal Indonesia.

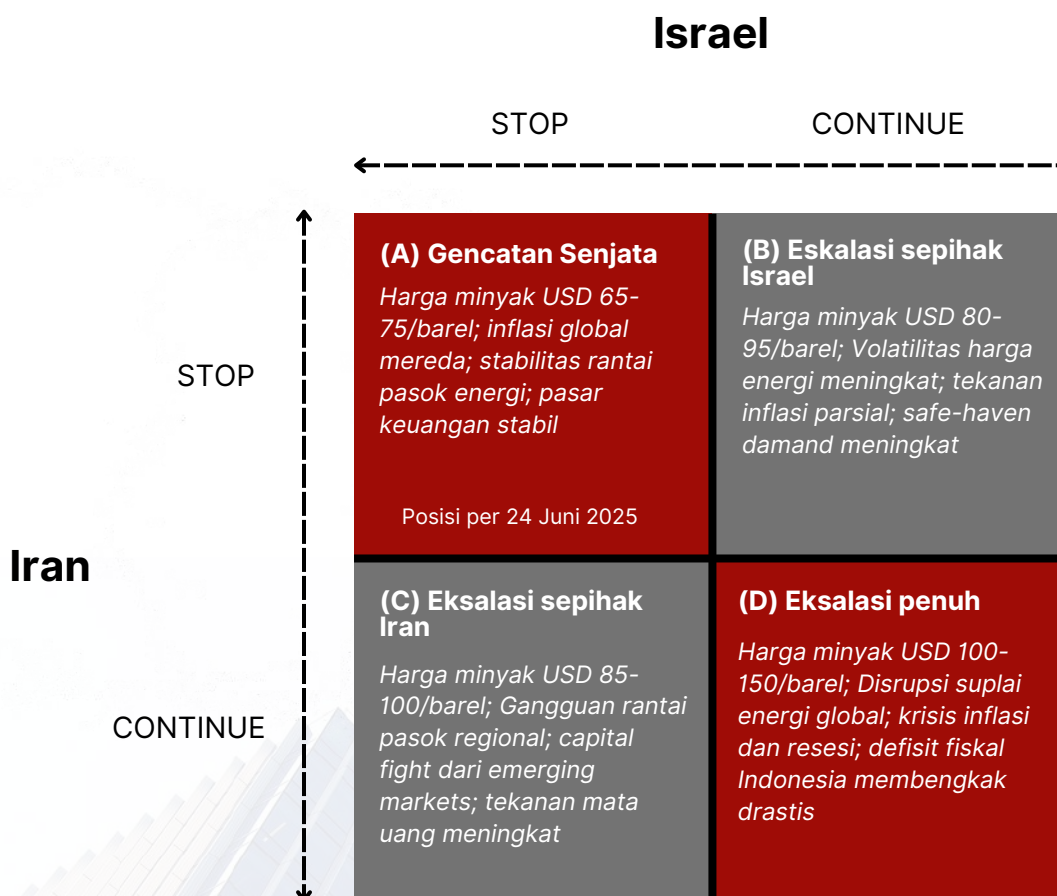
“Guncangan geopolitik di Selat Hormuz langsung merambat ke sektor keuangan global. Ketegangan Israel-Iran memicu lonjakan harga emas (+1,38%), pelemahan *yield* obligasi AS, dan penguatan indeks dolar. Pasar saham global tertekan: Dow Jones (-1,79%), S&P 500 (-1,13%), dan Nikkei 225 (-0,89%) pada 13 Juni. Meski pulih pasca gencatan senjata 24 Juni, volatilitas tetap tinggi. Jika konflik berlanjut, *capital flight* ke negara maju seperti AS bisa menekan mata uang dan pasar keuangan negara berkembang. Rupiah sendiri telah melemah 1,52% terhadap dolar dalam 10 hari setelah serangan, mencerminkan kerentanan sektor keuangan Indonesia terhadap ketidakpastian global.

Skenario Eskalasi dan Implikasi Ekonomi Global dan Domestik

Meski gencatan senjata telah disepakati sejak 24 Juni, konflik Israel-Iran masih sulit diprediksi. Keterlibatan langsung AS dalam serangan 22 Juni ke tiga pusat pengembangan nuklir Iran menunjukkan eskalasi konflik yang signifikan. Di sisi lain, narasi penggulingan rezim Ali Khamenei yang dikembangkan Israel dan AS juga dapat mempersulit jalur diplomasi dan memicu eskalasi ulang.

CORE memperkirakan konflik Israel-Iran tidak akan selesai dengan mudah meski gencatan senjata sudah disepakati. Namun, jika diplomasi buntu dan terjadi eskalasi kembali, konflik ini diperkirakan tidak akan berlangsung berlarut-larut seperti konflik Ukraina-Rusia. Tekanan dari berbagai negara yang menginginkan stabilitas ekonomi akan memangkas durasi konflik fisik, termasuk mencegah Iran untuk menutup Selat Hormuz yang sangat vital bagi 25 persen suplai minyak mentah global.

Dari perspektif ekonomi, ketidakpastian yang disebabkan konflik Israel-Iran ini meningkatkan volatilitas di pasar energi dan keuangan global. Meski gencatan senjata memberikan jeda, risiko gangguan terhadap rantai pasok energi global tetap tinggi selama akar masalah belum terselesaikan. Hal ini tentu saja menguatkan tekanan pada harga minyak dan menciptakan ketidakpastian bagi perencanaan ekonomi di jangka menengah.



Grafik 3. Matriks Dampak Ekonomi Konflik Israel-Iran
Sumber: Analisis CORE Indoneisa

Gambar 3 menunjukkan matriks dampak ekonomi konflik Israel-Iran berdasarkan intensitas konflik kedua negara. Kondisi terkini berada di kuadran (A) setelah gencatan senjata 24 Juni. Posisi di kuadran (A) memberikan harapan stabilitas harga minyak di kisaran USD 65-75 per barel, inflasi global mereda, dan rantai pasok energi serta pasar keuangan stabil.

Jika hanya Israel yang melakukan eskalasi (kuadran B), harga minyak akan naik ke USD 80-95 per barel, memicu tekanan pada pasar energi dan tekanan inflasi secara parsial. Sementara eskalasi sepihak Iran (kuadran C) akan mendorong harga minyak ke USD 85-100 per barel, yang berpotensi mengganggu rantai pasok regional dan memicu *capital flight* dari *emerging markets* termasuk Indonesia. Mencermati karakter kedua negara, kuadran B dan C kemungkinan hanya akan menjadi transisi sementara. Jika salah satu pihak menyerang, baik itu Israel atau Iran, kemungkinan besar pihak yang diserang akan lekas membalas.

Skenario terburuk adalah eskalasi penuh (kuadran D), di mana harga minyak dapat melonjak ke level USD 100-150 per barel, berpeluang menciptakan *supply shock* energi global yang memicu krisis inflasi dan resesi. Bagi Indonesia, skenario ini akan menyebabkan defisit fiskal membengkak drastis akibat lonjakan subsidi energi.

Transisi antar-kuadran dapat terjadi dengan cepat mengingat dinamika dan tensi geopolitik yang sangat tinggi. Meski saat ini berada di kuadran (A), risiko perpindahan ke kuadran (D) tetap signifikan jika diplomasi gagal. Pemerintah Indonesia perlu menyiapkan kebijakan antisipatif untuk setiap skenario, terutama dalam mengelola subsidi energi dan stabilisasi nilai tukar untuk menghadapi potensi guncangan ekonomi yang dapat berlangsung hingga beberapa bulan ke depan.

“

Konflik Israel-Iran menciptakan ketidakpastian tinggi di pasar energi dan keuangan global. Meski gencatan senjata memberi jeda (kuadran A), risiko eskalasi tetap besar. Jika konflik memburuk ke kuadran D, harga minyak bisa melonjak ke US\$100–150 per barel, memicu krisis inflasi global dan tekanan berat pada fiskal Indonesia akibat subsidi energi.

Pemerintah perlu menyiapkan respons cepat untuk tiap skenario, termasuk stabilisasi rupiah, penyesuaian harga BBM dan alokasi subsidi.

Kebijakan Responsif untuk Memperkuat Resiliensi Ekonomi Indonesia

Pertama, membangun Kebijakan fiskal yang adaptif dan responsif. Pemerintah perlu merancang kerangka kebijakan fiskal yang dapat merespons secara dinamis guncangan eksternal, khususnya volatilitas harga minyak. Ketika harga minyak dunia melampaui asumsi ICP dalam APBN (USD 82/barel), pemerintah harus mengaktifkan mekanisme penyesuaian otomatis: recalibrasi subsidi energi yang terukur, alokasi tambahan untuk BBM non-subsidi agar tetap pada level keekonomian, dan implementasi skema BLT darurat bagi kelompok rentan yang terdampak eskalasi harga energi. Menariknya, kenaikan harga minyak justru dapat menghasilkan *windfall* yang cukup signifikan melalui PPh migas dan PNBPN SDA. Namun, tambahan penerimaan ini tidak dapat mengompensasi sepenuhnya lonjakan belanja subsidi dan bansos yang jauh lebih besar. Untuk memitigasi gap fiskal ini, diperlukan strategi realokasi anggaran dari pos-pos non-prioritas, dan jika tekanan fiskal semakin intensif, pemerintah dapat mempertimbangkan ekspansi defisit yang terukur sesuai batas aturan fiskal yang diatur konstitusi.

Kedua, mengkonsolidasikan kebijakan moneter yang proaktif dan antisipatif. Bank sentral, melalui Bank Indonesia, harus mengimplementasikan strategi moneter yang preventif untuk menghadapi tekanan aliran modal keluar (*capital outflow*) saat investor global menggeser preferensi ke aset yang lebih aman (*flight-to-quality*). Kebijakan suku bunga acuan perlu dikalibrasi secara **forward-looking** untuk memitigasi inflasi yang diimpor (*imported inflation*) dari kenaikan harga minyak yang dapat mentransmisikan tekanan inflasi pada sektor energi dan transportasi. Stabilisasi nilai tukar melalui intervensi valuta asing yang strategis dan optimalisasi operasi moneter menjadi instrumen yang krusial untuk mempertahankan kepercayaan pasar dan mencegah volatilitas yang berlebihan.

Ketiga, mentransformasi momentum krisis menjadi akselerasi transisi energi. Di tengah ketidakpastian harga energi global yang tinggi, pemerintah perlu memperkuat ketahanan energi melalui diversifikasi portofolio energi menuju sumber-sumber terbarukan yang dapat dikembangkan secara domestik. Transisi menuju energi terbarukan seperti tenaga surya menjadi semakin strategis, bukan hanya untuk menurunkan ketergantungan terhadap energi fosil, tetapi juga untuk membangun kemandirian energi dan menciptakan ruang fiskal yang berkelanjutan di masa depan. Proyeksi CORE menunjukkan adanya peluang yang sangat positif dari transisi energi di Indonesia. Potensi pendapatan dari sektor energi terbarukan seperti PLTS dan rantai pasok manufakturnya dapat mencapai hingga **Rp 491 triliun per tahun**. Di sisi lain, subsidi listrik akan berkurang secara drastis dalam jangka panjang. Hal ini mengonfirmasi bahwa reorientasi kebijakan dari subsidi langsung menuju investasi infrastruktur PLTS merupakan strategi yang lebih efisien dan berkelanjutan untuk menjaga kesehatan anggaran negara dalam jangka panjang, lebih-lebih di tengah tensi ketidakpastian global yang sering kali mendisrupsi rantai pasok energi.



PENANGGUNG JAWAB

Mohammad Faisal, Ph.D

PENASIHAT

Akhmad Akbar Susanto, Ph.D

Prof. Dr. Sahara, S.P., M.Si.

Dr. Etika Karyani

Muhammad Ishak Razak, M.A

PENULIS

Yusuf Rendy Manilet, M.Ec.Dev

Azhar Syahida, MIntDevEc

Eliza Mardian, S.P.,M.S.P

ASISTEN PENELITI

Irzal Eka Saputra

M. Fathur Rahman

DESAIN DAN PUBLIKASI

Agus Priyanto

Nando Purnama Aji

Narahubung Publikasi dan Kerja Sama

📞 Emma Efidayanti
0813-1408-0397